SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA BERSAMA-SAMA DENGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas

Oleh:



Prof, Dr. Elwi Danil, S.H.,M.H. Efren Nova, S.H.,M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No. Reg: 20/PK-IV/I/2025

ABSTRAK

Penerapan sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuan dari penerapan sanksi pidana ini yaitu untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar akibat dari perbuatan yang dilakukan. Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pada kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan anak dan orang dewasa secara bersama-sama, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping seorang anak mendekam di penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan sedangkan orang dewasa yang bersama-sama dengan anak tersebut mendapatkan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang mana tidak adanya perbedaan yang signifikan antara pidana yang dijatuhkan antara orang dewasa dan anak. Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang dibahas yaitu: 1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Orang Dewasa Bersama-Sama Dengan Anak Di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping? dan 2. Apakah Putusan Hakim telah Mempertimbangkan Sanksi Pidana Anak Bersama-sama dengan Anak di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis hubungan antara teori hukum atau norma hukum yang ada dengan kenyataan atau praktik hukum yang terjadi atau berlaku di masyarakat dan penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menjelaskan pelaksanaannya secara rinci berdasarkan ke<mark>pada data</mark> primer dan data sekunder. Hasil p<mark>enelitian</mark> menjelaskan bahwa Hakim mempertimbangkan hak-hak anak serta aspek perlindungan yang mendorong pemulihan dan pencegahan. Berdasarkan fakta persidangan, putusan pengadilan mempertimbangkan tumbuh kembang anak dan dampak rehabilitatif hukuman. Namun penggunaan dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 112 kurang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci : Penerapan Sanksi pida<mark>na, Tindak P<mark>id</mark>ana Narkotika, Anak Berhadapan Dengan hukum</mark>

KEDJAJAAN